

Tarif Angkot Naik Rp1.000, Dishub DKI: Mikrotrans Tetap

JAKARTA (IM) - Dewan Transportasi DKI Jakarta telah menyetujui kenaikan tarif angkutan umum sebesar Rp 1.000 atau kenaikan sebesar 20%. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, tarif Mikrotrans tetap Rp 0.

"Tidak ada kenaikan tarif untuk layanan yang berada di trans," ungkap Syafrin di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/10).

Syafrin mengatakan, sebagai dampak adanya kenaikan tarif BBM bersubsidi beberapa bulan yang lalu, saat ini telah diberlakukan penyesuaian tarif angkutan umum bagi yang tidak termasuk dalam program Jaklingko. Syafrin menambahkan hal tersebut berarti tarif Mikrotrans yang saat ini Rp 0 tetap

diberlakukan sama. Begitu pula dengan tarif Transjakarta yang saat ini Rp 3.500 tidak ada kenaikan tarif.

Syafrin mengatakan, sesuai dengan regulasi di DKI Jakarta, kenaikan tarif angkutan umum atau angkot diserahkan kepada asosiasi pengusaha untuk menetapkan. Sementara itu, untuk tarif angkutan yang masuk kedalam program Jaklingko dan Transjakarta tidak mengalami kenaikan.

"Angkutan yang masuk ke dalam Jaklingko, yang dalam hal ini terintegrasi dengan layanan Transjakarta tidak ada kenaikan," kata Syafrin.

Adapun angkutan umum yang sudah terintegrasi dengan JakLingko di antaranya Transjakarta baik untuk koridor utama yang melalui halte (BRT) dan tanpa halte atau non-BRT. ● yan

Pemkot Jakarta Pusat Bersih-bersih Trotoar dan Gerebek Lumpur

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan bersih-bersih trotoar dan gerebek lumpur pada Minggu pagi (23/10).

Kegiatan bersih-bersih trotoar itu dilakukan di sepanjang Jalan Suprpto. Sedangkan kegiatan gerebek lumpur dilakukan di RW 04 Cempaka Baru.

"Untuk pagi ini ada dua kegiatan khususnya gerebek lumpur secara rutin di RW 04 Kelurahan Cempaka Baru dan bersih-bersih trotoar di sepanjang Jalan Suprpto," ucap Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat Denny Ramdany kala meninjau kegiatan tersebut dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (24/10).

Denny mengatakan kegiatan berskala besar itu merupakan tindak lanjut dari arahan Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Ini merupakan arahan dari penjabat gubernur terkait dengan pembenahan dan penataan trotoar khususnya

di jalan-jalan protokol," katanya.

Denny berharap dengan adanya kegiatan bersih-bersih trotoar, semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan baik.

"Kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Tapi selama kita bisa bekerja sama, insya Allah kesulitan apapun permasalahan bisa kita selesaikan," ucap dia.

Sebelumnya, kegiatan bersih-bersih trotoar dan gerebek lumpur diawali dengan apel pagi. Apel pagi itu diikuti hampir 300 personel dari delapan kelurahan di wilayah Kecamatan Kemayoran, dan unsur masyarakat seperti RT, RW, LMK, FKDM, Jumantik, dan Dasawisma.

Selain itu, pelaksanaan bersih-bersih trotoar dilaksanakan serentak di sejumlah titik wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Seperti di Jalan depan Stasiun Tanah Abang, Suparto, Salemba, Kramat Raya, Cempaka Putih dan Jalan Timur Raya, Pertokoan Pasar Baru, Pegangsaan Timur, dan Jalan Suryapranoto. ● yan



BAZAR KOLABORASI UMKM DI BALAI KOTA JAKARTA

Pengunjung melihat produk-produk yang dipamerkan dalam Bazar Kolaborasi UMKM di Balai Kota Jakarta, Jakarta, Senin (24/10). Bazar yang diikuti pelaku UMKM di wilayah Jakarta tersebut digelar guna mendorong pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang berlangsung dari 24-27 Oktober 2022.

Abu Batu Bara Kembali Cemari Rusun Marunda, Sudin LH Diminta Tegas

JAKARTA (IM) - Lingkungan Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara kembali dicemari abu batu bara yang berwarna hitam pekat. Warga yang terkena dampak abu batu bara berada di blok D3 Rusunawa Marunda. Warga pun mengeluhkan abu batu bara yang mengotori tempat tinggalnya. Selain itu, warga khawatir akan berdampak pada kondisi kesehatannya.

Cecep perwakilan warga menjelaskan, dirinya sudah melapor kejadian tersebut ke perwakilan forum masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) agar di teruskan ke Sudin LH Jakarta Utara.

Namun, hingga kini belum ada respon dari pihak Sudin LH. Cecep meminta, Sudin LH bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar.

"Iya debu batu bara itu datang kembali. Kami sudah melapor kan kejadian tersebut ke Sudin Lingkungan Hidup dibantu oleh FMRM namun dari

Sudin belum ada tanggapan lebih lanjut atas laporan tersebut," ucapnya, Senin (24/10).

Sementara, Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda, Didi Suwandi, menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut dirinya langsung melakukan investigasi terkait adanya abu batu bara.

"Kami langsung cek ke lokasi ternyata memang benar debu yang hitam pekat yang dihasilkan batu bara datang kembali di pekarangan rumah warga di Blok D3," jelasnya.

Asal muasal abu batu bara itu belum diketahui pasti dari perusahaan mana.

"Sampai saat ini kami masih belum mengetahui asal muasal debu itu berasal dari perusahaan mana, yang jelas kami minta Sudin Lingkungan Hidup harus menindak lanjut laporan warga agar tidak menimbulkan dampak negatif," pungkasnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



SIDAK PENJUALAN OBAT SIRUP DI BEKASI

Sejumlah pedagang menutup dengan kain lemari yang menyimpan obat sirup di apotek usai inspeksi mendadak (sidak) di Bekasi, Senin (24/10). Sidak tersebut untuk mengawasi peredaran obat-obatan dalam bentuk cair/sirup yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glukol berbahaya yang berdampak terhadap penyakit gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak-anak.

UNTUK ATASI BANJIR DAN MACET

Heru Budi Hartono Minta Jajarannya Bersinergi dengan TNI dan Polri

Bulan November, Desember dan Januari bahkan mungkin Februari, akan memasuki musim penghujan. Karena itu, Dishub dan jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya hingga TNI dapat bersinergi untuk memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat terkait titik-titik rawan genangan dan rawan kemacetan.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berharap jajarannya bisa bersinergi dengan TNI dan Polri mengatasi masalah banjir dan macet.

Hal itu disampaikan Heru Budi Hartono saat menggelar Apel Gabungan TNI, Polri, Dishub hingga BPBD di halaman Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (24/10).

Dalam sambutannya, Heru Budi Hartono memberikan arahan kepada satuan tersebut untuk selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai

titik yang rawan genangan banjir dan juga kemacetan.

Pasalnya, kata Heru, pada bulan November, Desember dan Januari bahkan mungkin Februari, akan memasuki musim penghujan.

"Maka dari itu, mungkin bersama dengan Kepala BPBD, Ditlantas, Dishub bisa lebih awal pembebasan lahan, tapi kalau itu pembebasan lahannya belum menyeluruh, itu belum bisa. Ini yang masih kita inventarisir. Jadi saya sekarang belum bisa mengatakan yang mana saja finalnya, karena itu akan diinventarisir dulu," ucap Bambang.

Namun Bambang memastikan bilamana wilayah yang akan dinormalisasi sudah *fix*, akan segera dianggarkan. "Secepatnya (diusulkan). Sekarang maknanya tim kita dengan tim dari DKI sudah jalan sama-sama," ucapnya.

Bambang menambahkan,

dapat bekerja work from home (WFH).

"Memberikan lebih awal itu lebih baik dan saya lihat juga alat-alat dari dishub memberikan informasi jauh-jauh hari melalui TMC melalui kanal-kanal resmi DKI sehingga masyarakat bisa memilih yaitu tetap bekerja atau WFH," tuturnya. "Selain itu, jika bekerja, mereka juga bisa memilih jalur yang lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan," sambung Heru.

Maka dari itu, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini berharap kepada Dishub dan jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya hingga TNI dapat bersinergi.

"Harapan saya adalah sekali lagi, Dishub, jajaran Ditlantas Polda Metro, dan didukung POM TNI bisa bersinergi. Karena harapan saya di sini hadir rekan saya Kaskartap pak Novi bisa membantu Dishub untuk melakukan penegakan disiplin," pungkasnya.

Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo akan menindaklanjuti arahan Heru tersebut, termasuk rencana penguurangan titik arus putar balik

atau u-turn dan penambahan jalur satu arah. Pihaknya segera melakukan kajian bersama dengan berbagai pihak termasuk Polda Metro Jaya agar dinamika lalu lintas di Jakarta bisa berjalan sesuai rencana.

ATASI KEMACETAN

Menhub Minta Tambah Fasilitas Parkir Vertikal di Tanah Abang

JAKARTA (IM) - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengusulkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menambah fasilitas parkir vertikal khususnya di kawasan Tanah Abang hingga Manggarai. Hal ini guna mengatasi masalah kemacetan.

"Saya mengusulkan Pak Pj Gubernur kiranya parkir ini ditambah vertikal ya. Pertama berkaitan dengan seperti pusat kegiatan Tanah Abang, Manggarai, dan beberapa tempat," ucap Budi kepada wartawan di Kantor Kemenhub Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/10). Ia menilai, penambahan

"Saat ini kami sedang melakukan kajian secara komprehensif, sehingga nanti dari hasil kajian akan didapatkan hasil yang paling optimal untuk kelancaran lalu lintas," kata Syafrin. ● yan

fasilitas parkir vertikal dapat mengatasi masalah kemacetan.

"Itu akan memberikan suatu daya dukung yang baik sehingga kemacetan di tempat-tempat umum itu akan berkurang," ujarnya.

Sementara itu, Heru Budi Hartono akan segera menindaklanjuti penyediaan fasilitas parkir vertikal di sejumlah titik.

"Saya ucapkan terima kasih Pak Menhub sudah memberikan waktu kepada kami sehingga apa yang tadi disampaikan poin-poin akan kami eksekusi, tindaklanjuti. Pertama soal parkir and ride ada beberapa yang bisa segera dieksekusi dan juga terkait tadi Manggarai, Tanah Abang," ujar Heru. ● yan

Kasus Gratifikasi Interchange Tol Cibitung-Cilincing Mandeg

BEKASI (IM) - Kasus dugaan gratifikasi proses pembukaan simpang susun (interchange) Tol Cibitung-Cilincing STA 18+250 masih berjalan di tempat. Padahal, kasus ini sudah dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak setahun lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas mengatakan hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penanganan terkendala karena masih minimnya alat bukti dan kehadiran para saksi.

"Alat bukti terus dikumpulkan, saksi-saksi juga menghalang hadir ada yang sakit, jadi kasus ini berlarut-larut," kata Ricky, Senin (24/10).

Kemudian, kata dia, persoalan lainnya yang dihadapi Kejari Kabupaten Bekasi dalam menuntaskan kasus tersebut adalah menumpuknya laporan tindak korupsi pidana lainnya, termasuk persoalan PTSL.

"Jadi penanganan perkara banyak, seperti PTSL kemarin kan tangkap tangan, jadi harus lebih cepat (penanganannya) dan mudah ditahan," ungkapnya.

Ricky berjanji jika keterangan saksi dan alat bukti sudah cukup, pihaknya akan akan segera menetapkan tersangka pada kasus tersebut.

"Kalo alat buktinya mendukung pemberi dan penerima

akan ditetapkan tersangka," kata Ricky.

Untuk diketahui, konstruksi kasus ini berawal dari permohonan pembukaan simpang susun pada Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing.

Dalam upaya pembukaan persimpangan ini diduga ada tindakan gratifikasi yang berkaitan dengan kewenangan pejabat daerah.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga telah meminta keterangan dari mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi 'JI' pada saat pemanggilan tahun kedua karena yang bersangkutan mangkir saat pemanggilan pertama.

Kejaksaan juga telah memeriksa dua orang lain yakni LS dan RT dari pihak swasta. Ketiga orang itu diduga turut terlibat tindak pidana korupsi pada Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Bekasi tersebut. ● yan



PEMBUKAAN JAKARTA FASHION WEEK 2023

Model memeragakan busana dalam pembukaan Jakarta Fashion Week (JFW) 2023 di Pondok Indah Mall 3, Jakarta, Senin (24/10). JFW 2023 menghadirkan sebanyak 116 perancang busana dengan mengusung tema "Fashion Reformation" dan berlangsung pada 24-30 Oktober 2022.

FOTO/ANT

PENGUMUMAN

Berdasarkan hasil keputusan RUPS PT BERKAH WASTU KENCANA, berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perbaikan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 24/10/2022, yang dibuat dihadapan Beni Aguselyanto, SH Notaris di Depok, telah disetujui Pembubaran Perseroan dan di likuidasi oleh Tim Kurator melalui RUPS yang diatur dalam pasal 142 UUPK No. 40 Tahun 2007.

Adapun kepada pihak yang berkepentingan mohon menghubungi Perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini dimuat dalam Surat Kabar ini.

Demikianlah pengumuman ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Harmat kami
Para Pemegang Saham/Likuidasi

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta PKR PT. ALFA BETA INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Barat, Tgl. 20 Oktober 2022, No. 10, dibuat dihadapan Idrisyanah Rizal, SH, Notaris di Kab. Tangerang, Para Pendiri dan Pemegang Saham telah memutuskan membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta telah menyetujui pengangkatan Nn. INTAN KHAERUNNISA sebagai Likuidator Perseroan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 147 UU no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Likuidator
PT. Alfa Beta International

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Pembubaran dan LIKUIDASI DAN KETERAMPILAN INSTITUT PENGEMBANGAN BISNIS INDONESIA (Dalam Likuidasi) berkedudukan di Jakarta Timur "Yayasan", yang dimuat dalam Keputusan Pembubaran tanggal 24 Oktober 2022, telah diputuskan antara lain: Menyetujui hasil likuidasi dan menerima laporan pertanggung jawaban likuidator dan memberikan pembebasan pertanggung jawaban sepenuhnya. Bagi para pihak yang berkepentingan dapat menghubungi likuidator secara tertulis di Kantor Yayasan: Jl. Raya Bekasi KM. 24 Blok 1 & 2 Taman Pulo Gebang, Cikarang, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Demikian pengumuman ini diumumkan guna memenuhi ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Yayasan PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN INSTITUT PENGEMBANGAN BISNIS INDONESIA (Dalam Likuidasi)